



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 8195-8203

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Instrumen Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Syifa Mahadini Saskia

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

syifamahadini@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, termasuk Jawa Barat. Meskipun provinsi ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, disparitas pembangunan antarwilayah masih cukup tinggi. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki instrumen kebijakan berupa Transfer Daerah dan Belanja Modal yang diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel yang mencakup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2017–2024. Model estimasi yang digunakan adalah Random Effect Model (REM) dengan total 189 observasi setelah mempertimbangkan penggunaan variabel lag pada Belanja Modal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel independen terdiri dari Transfer Daerah, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diprosikan melalui PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat belum sepenuhnya bersifat inklusif dan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Sebaliknya, Transfer Daerah dan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen fiskal daerah belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsi redistribusi pendapatan di tingkat regional.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Instrumen Fiskal, PDRB, Data Panel, Jawa Barat.

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan tersebut dapat terdistribusi secara merata dan inklusif (Arsyad, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti dengan pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, isu ketimpangan menjadi salah satu perhatian penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Ketimpangan wilayah sering kali muncul akibat konsentrasi aktivitas ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu yang memiliki keunggulan infrastruktur, akses pasar, serta ketersediaan sumber daya manusia yang lebih baik. Wilayah yang memiliki fasilitas transportasi yang memadai, kawasan industri, serta akses terhadap investasi biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. Kondisi ini menyebabkan proses pembangunan tidak berlangsung secara merata antarwilayah dan menimbulkan disparitas ekonomi regional (Kanbur & Venables, 2005).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut kemudian dapat memicu ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi lebih maju cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang pertumbuhannya relatif tertinggal. Dalam proses pembangunan ekonomi, sektor modern umumnya berkembang lebih cepat dibandingkan sektor tradisional sehingga menciptakan perbedaan tingkat produktivitas dan pendapatan antar kelompok masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Akibatnya, sebagian masyarakat dapat menikmati peningkatan pendapatan yang signifikan, sementara kelompok lainnya mengalami peningkatan yang lebih lambat.

Peran Instrumen Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Barat

8195

Selain disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi, ketimpangan juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan, serta peluang kerja yang tersedia di suatu wilayah. Daerah yang memiliki kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik cenderung mampu menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif sehingga memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan fasilitas tersebut sering kali mengalami hambatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan efektivitas pertumbuhan jangka panjang. Menurut Barro (2000), ketimpangan yang tinggi dapat menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui keterbatasan akses pendidikan dan modal bagi kelompok berpendapatan rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia secara optimal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai distribusi yang merata berpotensi menimbulkan fenomena *growth without equity*, yaitu kondisi ketika peningkatan output ekonomi tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Ravallion, 2001).

Dalam kajian ekonomi regional, ketimpangan antarwilayah umumnya diukur menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini mengukur disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar daerah dalam suatu wilayah administratif. Indeks Williamson dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson (1965) untuk menganalisis ketimpangan regional dalam proses pembangunan ekonomi. Secara metodologis, indeks ini menggunakan pendekatan deviasi standar tertimbang terhadap rata-rata PDRB per kapita, sehingga mampu menggambarkan tingkat variasi ekonomi antarwilayah secara kuantitatif. Nilai indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang lebih baik. Oleh karena itu, Indeks Williamson dianggap relevan dalam mengukur disparitas pembangunan regional karena mampu menggambarkan variasi PDRB per kapita antarwilayah secara komprehensif (Sjafrizal, 2012).

Selain ketimpangan antarwilayah yang dapat diukur menggunakan Indeks Williamson, penelitian ini secara khusus menekankan pada ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang diukur menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini digunakan karena mampu menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah, sehingga memberikan perspektif yang lebih langsung mengenai distribusi kesejahteraan masyarakat.

Dalam delapan tahun terakhir, Indeks Williamson di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang relatif tinggi meskipun cenderung menurun secara bertahap. Nilai indeks yang masih berada di atas 0,7 menunjukkan bahwa disparitas pembangunan antarwilayah di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sementara daerah lain berkembang relatif lebih lambat.

Tabel 1. Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2024

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,76	0,76	0,76	0,72	0,74	0,741	0,74	0,73

Sumber: Data diolah (2026)

Tingginya nilai Indeks Williamson tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi di Jawa Barat belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan perkembangan antar kabupaten dan kota. Beberapa wilayah yang menjadi pusat industri dan perdagangan memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor primer. Perbedaan kapasitas ekonomi ini kemudian berkontribusi terhadap perbedaan tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masih terpusat pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif dalam hal infrastruktur, investasi, serta akses terhadap pasar.

Ketimpangan antarwilayah tersebut juga berkaitan erat dengan pola perkembangan kawasan industri di Jawa Barat. Beberapa daerah seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dikenal sebagai pusat kawasan industri yang menjadi tujuan utama investasi nasional maupun internasional. Kehadiran kawasan industri tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan wilayah lain yang masih bergantung pada sektor pertanian atau sektor informal. Akibatnya, wilayah yang memiliki konsentrasi industri cenderung mengalami

peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang aktivitas ekonominya masih terbatas.

Di sisi lain, daerah yang tidak memiliki akses yang sama terhadap investasi industri sering kali mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya akses terhadap pasar menjadi faktor yang menghambat perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Ketimpangan kondisi tersebut menyebabkan manfaat pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah di Jawa Barat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu kesenjangan kesejahteraan antarwilayah yang semakin lebar apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Selain ketimpangan antarwilayah, distribusi pendapatan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan biasanya diukur menggunakan Indeks Gini yang menggambarkan sejauh mana pendapatan masyarakat terdistribusi secara merata dalam suatu wilayah. Jika Indeks Williamson lebih menekankan pada perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, maka Indeks Gini memberikan gambaran mengenai kesenjangan kesejahteraan antar individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Nilai Indeks Gini yang semakin tinggi menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata, sementara nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat pemerataan yang lebih baik.

Dalam konteks pembangunan daerah, ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun kebijakan pemerintah. Salah satu faktor yang sering dikaji dalam penelitian ekonomi regional adalah pengaruh kebijakan fiskal daerah terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kebijakan fiskal daerah mencakup berbagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Salah satu instrumen utama dalam sistem tersebut adalah transfer daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer daerah bertujuan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya keuangan (Mahi & Adji, 2019). Dengan adanya transfer fiskal tersebut, diharapkan daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah tetap dapat menyediakan layanan publik yang memadai bagi masyarakat.

Menurut Oates (1972), dana transfer memiliki fungsi penting dalam menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang relatif sama dalam melaksanakan pembangunan. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat berupaya mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik serta pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, transfer daerah diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan serta pengurangan ketimpangan pendapatan.

Selain transfer daerah, instrumen fiskal lain yang juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah adalah Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap seperti infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai sarana publik lainnya. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas terhadap pasar dan peluang investasi.

Pembangunan infrastruktur melalui Belanja Modal juga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat mempermudah mobilitas tenaga kerja, menurunkan biaya transportasi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas tersebut, aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang lebih cepat sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Namun demikian, efektivitas Belanja Modal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan tidak selalu bersifat langsung. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat sering kali memerlukan waktu yang relatif panjang sebelum dapat dirasakan secara nyata. Selain itu, alokasi Belanja Modal yang tidak merata

antar sektor juga dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Jika Belanja Modal lebih banyak difokuskan pada sektor-sektor tertentu yang tidak secara langsung melibatkan masyarakat berpendapatan rendah, maka dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan menjadi relatif terbatas.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui peningkatan PDRB juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi dinamika ketimpangan pendapatan. PDRB merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah karena mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam wilayah tersebut. Peningkatan PDRB umumnya diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, peningkatan PDRB tidak selalu berarti bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi, seperti industri manufaktur dan jasa modern. Sementara itu, sebagian masyarakat masih bekerja pada sektor tradisional dengan tingkat produktivitas yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena tersebut sejalan dengan hipotesis Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena sektor-sektor modern berkembang lebih cepat dibandingkan sektor tradisional sehingga menciptakan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya tingkat pembangunan ekonomi, ketimpangan tersebut diperkirakan akan menurun ketika kesempatan ekonomi menjadi lebih merata (Lessmann, 2014).

Beberapa penelitian empiris di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Ridho dan Wijayanti (2022) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa transfer fiskal dapat berperan dalam memperbaiki distribusi pendapatan apabila dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah. Namun demikian, penelitian Ashfahany et al. (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memperlebar ketimpangan regional apabila kapasitas daerah dalam mengelola keuangan tidak merata.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyo dan Zuhri (2019) menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap ketimpangan pendapatan dapat berbeda antar wilayah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta efektivitas implementasi kebijakan pembangunan di masing-masing daerah. Selain itu, Ishak et al. (2018) menemukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan karena sebagian besar alokasi pembangunan masih difokuskan pada sektor-sektor tertentu yang tidak secara langsung meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Perekonomian Jawa Barat sendiri merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional karena kontribusinya yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Namun demikian, tingginya kontribusi ekonomi tersebut tidak selalu diikuti oleh pemerataan pembangunan antar wilayah. Beberapa daerah berkembang pesat sebagai pusat industri dan perdagangan, sementara daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan sektor ekonomi produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena backwash effect, yaitu kecenderungan aktivitas ekonomi untuk terkonsentrasi di wilayah yang telah maju sehingga memperlebar kesenjangan dengan daerah yang tertinggal (Myrdal, 1957).

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer daerah, Belanja Modal, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana instrumen fiskal daerah serta pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi dinamika ketimpangan pendapatan dan mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel untuk mengkaji pengaruh instrumen fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris dengan menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Melalui pendekatan ini, hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan dinamika pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dapat diukur secara lebih objektif dan sistematis.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan periode pengamatan tahun 2017–2024. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi serta memiliki variasi tingkat pembangunan antarwilayah. Perbedaan karakteristik ekonomi antar kabupaten/kota menjadikan wilayah ini relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Kedua sumber data tersebut dipilih karena menyediakan data resmi yang berkaitan dengan indikator ekonomi daerah serta informasi mengenai transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan dimensi waktu (*time series*) dan dimensi individu (*cross section*). Kombinasi kedua dimensi tersebut memungkinkan penelitian untuk mengamati dinamika perubahan variabel dari waktu ke waktu sekaligus membandingkan kondisi antarwilayah dalam periode yang sama. Dengan demikian, analisis data panel dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan data *time series* atau *cross section* secara terpisah. Secara keseluruhan, jumlah observasi yang digunakan dalam model estimasi adalah sebanyak 189 data. Jumlah observasi tersebut diperoleh setelah mempertimbangkan penggunaan variabel lag pada belanja modal yang menyebabkan sebagian data pada periode awal tidak dapat digunakan dalam proses estimasi. Oleh karena itu, dataset yang dianalisis merepresentasikan kombinasi pengamatan antarwilayah dan antarperiode yang relevan dengan tujuan penelitian.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen yang terdiri dari instrumen fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen berupa ketimpangan pendapatan. Untuk meningkatkan stabilitas varians data serta memudahkan interpretasi koefisien dalam bentuk elastisitas, seluruh variabel dalam model ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (\ln). Transformasi logaritma juga umum digunakan dalam analisis ekonomi karena mampu mengurangi perbedaan skala antarvariabel serta membantu meminimalkan potensi heteroskedastisitas pada data yang memiliki rentang nilai cukup besar.

Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln GINI_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln TRF_{it} + \beta_2 \ln BM_{it-1} + \beta_3 \ln PDRB_{it} + \epsilon_{it}$$

Pada persamaan tersebut, $\ln GINI$ merupakan logaritma natural dari Indeks Gini yang digunakan sebagai indikator tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu kabupaten/kota dalam periode tertentu. Indeks Gini dipilih karena merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeks tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin besar.

Variabel $\ln TRF$ merepresentasikan logaritma natural dari total transfer daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Transfer daerah dalam penelitian ini mencakup beberapa komponen utama yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Variabel ini digunakan untuk menggambarkan instrumen fiskal yang berfungsi mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik.

Variabel $\ln BM_{(t-1)}$ merupakan logaritma natural dari belanja modal pemerintah daerah yang digunakan untuk pengadaan aset tetap serta pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini, belanja modal menggunakan lag satu tahun ($t-1$). Penggunaan lag tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dampak belanja modal terhadap aktivitas ekonomi masyarakat tidak terjadi secara langsung pada tahun yang sama. Pembangunan infrastruktur seperti jalan,

jembatan, maupun fasilitas publik lainnya memerlukan waktu sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan lag satu periode diharapkan dapat lebih mencerminkan pengaruh belanja modal terhadap dinamika ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya, variabel *lnPDRB* merupakan logaritma natural dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Variabel ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah yang mencerminkan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi pada tingkat kabupaten/kota. Dengan memasukkan variabel PDRB ke dalam model, penelitian ini berupaya melihat bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi daerah berhubungan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui serangkaian pengujian pemilihan model. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model *common effect* atau *fixed effect* lebih sesuai digunakan dalam analisis. Selanjutnya, Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pilihan antara model *fixed effect* dan *random effect*. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, model yang dipilih sebagai metode estimasi dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Model ini dipilih karena dinilai mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota yang bersifat acak serta tidak sepenuhnya dapat diamati dalam model. Dengan demikian, pendekatan *random effect* dianggap lebih tepat untuk menangkap variasi antarwilayah dalam analisis ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil

Penelitian ini menggunakan model *Random Effect Model* (REM) dengan metode estimasi *Cross-section weights (PCSE) standard errors*. Metode ini digunakan dalam analisis data panel untuk memperoleh estimasi yang lebih stabil dengan mempertimbangkan kemungkinan perbedaan varians antar unit pengamatan. Seluruh variabel dalam model ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (*ln*) sehingga koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Hasil estimasi model regresi data panel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.
Konstanta (C)	-3,011350	-4,828642	0,0000
lnTransfer Daerah (TRF)	0,023317	0,662918	0,5082
lnBelanja Modal (BM(t-1))	0,002322	0,152124	0,8793
lnPDRB	0,094905	3,656874	0,0003

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 2, konstanta dalam model memiliki nilai koefisien sebesar -3,011350 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa konstanta signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%.

Variabel *lnTransfer Daerah (TRF)* memiliki nilai koefisien sebesar 0,023317 dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,662918 serta probabilitas sebesar 0,5082. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%.

Variabel *lnBelanja Modal (BM(t-1))* memiliki koefisien sebesar 0,002322 dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,152124 dan probabilitas sebesar 0,8793. Nilai probabilitas ini juga berada di atas tingkat signifikansi 5%.

Sementara itu, variabel *lnPDRB* memiliki nilai koefisien sebesar 0,094905 dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,656874 serta probabilitas sebesar 0,0003. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil estimasi model, nilai koefisien masing-masing variabel menunjukkan arah hubungan positif terhadap variabel dependen. Namun, dari ketiga variabel independen yang dianalisis dalam model, hanya variabel PDRB yang memiliki nilai probabilitas di bawah tingkat signifikansi 5%.

3.2 Pembahasan

Variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap Indeks Gini di Jawa Barat. Nilai koefisien sebesar 0,0949 menunjukkan elastisitas, di mana setiap kenaikan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,09%. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat belum sepenuhnya disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan kata lain, peningkatan aktivitas ekonomi daerah tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, teknologi, maupun kesempatan ekonomi.

Secara umum, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan telah lama menjadi perhatian dalam kajian ekonomi pembangunan. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah hipotesis Kuznets. Menurut hipotesis Kuznets, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan mengikuti pola kurva U terbalik (*inverted-U relationship*) (Kuznets, 1955). Pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan biasanya terkonsentrasi pada sektor-sektor modern yang lebih produktif, seperti industri dan jasa. Pada fase ini, sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor tradisional dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Perbedaan tingkat produktivitas antar sektor tersebut menyebabkan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat menjadi semakin besar.

Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi dan transformasi struktural ekonomi, sebagian tenaga kerja dari sektor tradisional mulai berpindah ke sektor modern yang lebih produktif. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, sebelum proses tersebut terjadi secara merata, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat terlebih dahulu. Dengan demikian, temuan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan dapat mencerminkan bahwa suatu wilayah masih berada pada fase awal atau menengah dalam proses pembangunan ekonomi.

Dalam konteks Jawa Barat, kondisi tersebut dapat dipahami melalui pola perkembangan ekonomi wilayah yang tidak merata. Aktivitas ekonomi di provinsi ini banyak terkonsentrasi pada kawasan industri tertentu yang memiliki tingkat produktivitas dan investasi yang relatif tinggi. Beberapa wilayah seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dikenal sebagai pusat kawasan industri nasional yang menjadi lokasi berbagai perusahaan manufaktur dan industri skala besar. Keberadaan kawasan industri tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat di wilayah tersebut dibandingkan dengan daerah lain yang masih bergantung pada sektor pertanian atau sektor informal.

Perbedaan struktur ekonomi antar wilayah tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Daerah yang memiliki basis industri dan aktivitas ekonomi modern umumnya mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah yang masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional atau sektor informal cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah. Akibatnya, peningkatan PDRB yang terjadi di tingkat provinsi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan apabila aktivitas ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah atau sektor tertentu.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lessmann (2014) yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, peningkatan pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi cenderung berpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur, investasi, dan sumber daya manusia yang lebih baik. Sementara itu, wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor tersebut mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Dalam kondisi seperti ini, kesenjangan antar wilayah dapat semakin melebar seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan.

Berbeda dengan variabel PDRB, variabel Transfer Daerah dan Belanja Modal dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat signifikansi 5%. Nilai probabilitas yang berada di atas 0,05 menunjukkan bahwa secara statistik kedua variabel tersebut belum mampu menjelaskan variasi Indeks Gini antar kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode penelitian. Hasil ini

menunjukkan bahwa keberadaan instrumen fiskal daerah dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat maupun belanja modal pemerintah daerah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan tingkat ketimpangan pendapatan.

Secara teoritis, transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya dana transfer yang diterima oleh daerah belum tentu berdampak langsung pada distribusi pendapatan masyarakat.

Salah satu kemungkinan penyebab kondisi tersebut adalah komposisi penggunaan anggaran daerah yang masih didominasi oleh belanja rutin, seperti belanja pegawai dan biaya operasional pemerintahan. Apabila sebagian besar dana transfer digunakan untuk membiayai pengeluaran administratif, maka dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung menjadi relatif terbatas. Dalam kondisi seperti ini, dana transfer lebih berperan dalam menjaga stabilitas fiskal pemerintah daerah dibandingkan sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ishak et al. (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas dana transfer dalam mendorong pemerataan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran serta prioritas belanja pemerintah daerah.

Selain itu, variabel Belanja Modal dalam penelitian ini juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan meskipun telah menggunakan lag satu periode. Penggunaan lag dalam model bertujuan untuk mempertimbangkan adanya jeda waktu antara realisasi belanja modal dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, maupun sarana transportasi umumnya membutuhkan waktu sebelum dapat memberikan manfaat ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Hasil yang tidak signifikan pada variabel belanja modal menunjukkan bahwa dampak pembangunan infrastruktur terhadap distribusi pendapatan kemungkinan memerlukan periode waktu yang lebih panjang untuk dapat terlihat secara nyata. Infrastruktur yang dibangun pada suatu periode belum tentu langsung meningkatkan kesempatan ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat pada periode berikutnya. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa sebagian proyek belanja modal lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas industri atau investasi skala besar, sehingga manfaat ekonominya tidak secara langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi dinamika ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan instrumen fiskal daerah yang dianalisis dalam model. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah tidak selalu disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan apabila tidak didukung oleh kebijakan yang secara khusus menargetkan kelompok masyarakat yang rentan. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang lebih terarah, pertumbuhan ekonomi berpotensi memperlebar kesenjangan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif menjadi penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017–2024, penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen fiskal daerah yang diprosikan melalui Transfer Daerah dan Belanja Modal belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran daerah belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsi redistribusi pendapatan. Sebaliknya, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat masih cenderung terkonsentrasi pada wilayah atau sektor tertentu sehingga manfaatnya belum terdistribusi secara merata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan fiskal daerah agar alokasi Belanja Modal dan Transfer Daerah lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan akses ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah

diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

Referensi

1. Ashfahany, A. E., Djuuna, R. F., & Rofiq, N. F. (2020). Does fiscal decentralization increase regional income inequality in Indonesia? *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2).
2. Ishak, I., Rahman, A., & Putri, S. (2018). Analisis pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
3. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*.
4. Lessmann, C. (2014). Spatial inequality and development: Is there an inverted-U relationship? *Journal of Development Economics*, 106.
5. Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
6. Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1).
7. Kanbur, R., & Venables, A. J. (2005). *Spatial inequality and development*. Oxford: Oxford University Press.
8. Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of tendencies. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4).
9. Barro, R. J. (2000). Inequality and growth in a panel of countries. *Journal of Economic Growth*
10. Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*.
11. Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
12. Myrdal, G. (1957). *Economic theory and underdeveloped regions*. London: Duckworth.
13. Mahi, B. R., & Adji, A. S. (2019). *Desentralisasi fiskal di Indonesia*. Jakarta: FEB UI Press.
14. Prasetyo, A. D., & Zuhri, S. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
15. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson.
16. Sjafrizal. (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Jakarta.